

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

ISSN NO. 2337-5299 Volume 1 / Nomor 1 / Tahun 2013

Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan

DAFTAR ISI

Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna” Bandung <i>Ayi Haryani dan Enung Huripah</i>	89 – 104
Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Bekasi <i>Fernandes Simangunsong</i>	105 – 130
Reformasi Birokrasi Kabinet Kerja Jokowi-JK <i>Ilham Gemiharto</i>	131 – 141
Zigzag Kebijakan <i>State of the Art</i> Ilmu Pemerintahan di Indonesia <i>Pipin Hanapiah</i>	142 – 151
Konstruksi Pemberitaan Surat Kabar Dalam Kampanye Jokowi Dalam Pencalonan Sebagai Presiden <i>R.Indriyati</i>	152 – 161
Kualitas Pelayanan Aparatur Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Dalam Program Unggulan Website www.disnakjabar.prov.go.id <i>Tatik Rohmawati dan Ari Yunadi</i>	162 – 180
Perspektif Administrasi Publik Dalam Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara <i>Yudi Rusfiana</i>	181 – 192

PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS NETRA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI PANTI SOSIAL BINA NETRA “WYATA GUNA” BANDUNG

Ayi Haryani¹ dan Enung Huripah²

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengkaji seberapa besar keterlibatan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik khususnya pada proses pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 di Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna” Bandung. Dengan menggunakan metode kualitatif, diperoleh berupa data primer yang diambil langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden RI tahun 2014, serta data sekunder yang merupakan data tidak langsung, berupa kebijakan-kebijakan baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh penyandang disabilitas netra dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden tahun 2014 di PSBN “Wyata Guna” Bandung, belum menunjukkan adanya partisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesetaraan dengan warga negara lainnya. Namun, kesadaran mereka atas hak partisipasi politiknya telah cukup terbangun dengan baik, hal ini sudah disadarinya bahwa suara mereka juga dibutuhkan untuk mengangkat kepedulian pemerintah terhadap hak-haknya, namun perhatian pemerintah terhadap hak politik mereka belum disertai dengan upaya implementasi yang terencana, sistematis, dan praktis dalam menyiapkan fasilitas dan mengurangi kendala yang akan dialami penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu, termasuk menghilangkan hak dan perlakuan yang bernuansa diskriminatif dalam pelayanan oleh penyelenggara lokal.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas Netra, Pemilihan Umum

STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BEKASI

Fernandes Simangunsong³

Abstrak

Data menunjukkan di era reformasi sejak tahun 1999 hingga sekarang tercatat 171 daerah otonom baru telah terbentuk, terdiri atas 7 (tujuh) provinsi, 135 kabupaten dan 31 kota, yang diusulkan oleh daerah berdasarkan aspirasi masyarakat. Fakta tersebut menggambarkan bahwa dalam perjalanan implementasi kebijakan otonomi daerah, pemekaran/pembentukan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota telah banyak dilakukan. Hal ini dapat dimaklumi, sebab substansi pemekaran/pembentukan daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan organisasi pemerintah kepada masyarakat. Melalui pemekaran/pembentukan daerah diharapkan tujuan kebijakan otonomi daerah seperti peningkatan pelayanan, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Kata kunci : Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Pelayanan Publik.

¹ Dosen STKS Bandung

² Dosen STKS Bandung

³ Dosen IPDN

Reformasi Birokrasi Kabinet Kerja Jokowi-JK

Ilham Gemiharto⁴

ABSTRAK

Reformasi Birokrasi menjadi kata kunci bagi pemerintahan Jokowi yang telah mematok target 7% pertumbuhan ekonomi nasional dalam masa kepemimpinannya. Meskipun target tersebut sulit dicapai dalam kondisi perekonomian saat ini, namun juga bukan hal yang mustahil. Diperlukan pembangunan infrastruktur yang massif dan ditunjang oleh penguatan sumber daya manusia untuk mencapai target tersebut. Namun yang jauh lebih mendasar sebetulnya adalah penguatan institusi birokrasi sebagai penyelenggara negara. Penguatan institusi birokrasi melalui reformasi birokrasi Kabinet Kerja Jokowi-JK dapat dijadikan sebagai tolak ukur awal.

Salah satu misi utama pemerintahan Jokowi-JK adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik.

Pembentukan Kabinet Kerja yang terdiri dari para profesional dan profesional partai meskipun masih mencerminkan adanya kompromi politik, namun memberikan harapan baru bagi upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi 100 hari pertama Kabinet Kerja Jokowi-JK menunjukkan upaya yang serius dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi dari beberapa menteri di Kabinet Kerja. Apabila mereka tetap konsisten dengan kinerjanya saat ini niscaya target pertumbuhan ekonomi 7% dapat tercapai dalam masa pemerintahan Jokowi-JK.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Kabinet Kerja, Jokowi-JK

Zigzag Kebijakan *State of the Art* Ilmu Pemerintahan di Indonesia

Pipin Hanapiah⁵

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan zigzag *State of the Art* (SotA) Ilmu Pemerintahan di Indonesia pada perguruan-perguruan tinggi penyelenggara program studi Ilmu Pemerintahan. Obyek dan kasus dalam artikel ini adalah *SotA* Ilmu Pemerintahan, yang berfokus pada dinamikanya yang berjalan secara zigzag. Artikel ditulis menggunakan kajian Ilmu Pemerintahan, pendekatan kualitatif, dan metode deskriptif dengan pengumpulan informasi melalui teknik-teknik studi dokumentasi dan kepustakaan.

Setiap kebijakan publik mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu secara periodik, baik dalam perumusan, implementasi, maupun evaluasinya. Perubahan seperti ini dikenal dengan dinamika kebijakan publik. Dinamika ini bisa terjadi dalam jangka panjang (*longterm/longitudinal*) atau jangka pendek (*shortterm/snapshot*).

Dari hasil kajian ditemukan kebijakan *SotA* Ilmu Pemerintahan di Indonesia berjalan secara zigzag. Namun demikian, di masa depan diperkirakan menjadi kuat pada jatidiri landasan-landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya sehingga jatidiri keilmuannya pada pilar-pilar terminologi, metodologi, dan *applied-sciencenya* akan semakin mapan.

Untuk lebih memaparkan *SotA*-nya itu, otoritas Perguruan Tinggi penyelenggara program studi Ilmu Pemerintahan di Indonesia perlu semakin meningkatkan inovasi dan kinerja akademiknya sehingga semakin mampu berkompetisi dengan mereka yang ada di luar negeri secara berkesinambungan.

Kata Kunci: zigzag kebijakan, *state of the art*, ilmu pemerintahan.

⁴ Dosen Tetap Jurusan Manajemen Komunikasi FIKOM UNPAD

⁵ Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Unpad

KONSTRUKSI PEMBERITAAN SURAT KABAR DALAM KAMPANYE JOKOWI DALAM PENCALONAN SEBAGAI PRESIDEN

R.Indriyati⁶

ABSTRAK

Berita mempunyai posisi terdepan dalam media massa. Berita merupakan salah satu bagian dari produk informasi tentang segala hal yang berguna dan bermanfaat dalam rangka memberikan pencerahan bagi peradaban kehidupan manusia. Realitas-realitas peristiwa yang terjadi dalam semua aspek kehidupan yang meliputi : aspek sosial, hukum, ekonomi, politik, agama semuanya merupakan bahan-bahan utama proses dalam membuat suatu berita yang akan disajikan pada masyarakat. Para pemegang kepentingan dalam produk berita suatu media massa yaitu Pemimpin Redaksi, Dewan Redaksi, Redaktur pelaksana, Sekretaris Redaksi, Staf Redaksi, Redaktur *Desk* hingga wartawan mempunyai peran penting bagaimana suatu berita dapat di olah dengan kadar kualitas jurnalisme yang baik.

Diantara semua pemegang kepentingan, peran terdepan dan strategis adalah wartawan, karena wartawan adalah insan jurnalis yang pertama kali meliput suatu pemberitaan dilapangan, dalam peran ini pulalah suatu kualitas berita dengan bobot baik sangat menentukan. Prinsip-prinsip jurnalisme yang senantiasa mengutamakan aspek *Aktualitas, faktualitas, Impartialitas* senantiasa menjadi rujukan utama semua wartawan. Rambu-rambu regulasi UU Pers no 40 tahun 1999 maupun kode etik jurnalistik menjadi batasan gerak profesional para wartawan akan senantiasa dijadikan sebagai pegangan.

Kata Kunci : Konstruksi Berita, Kampanye Politik, Penyeleksian isu dan Pencalonan Presiden

PELAKSANAAN FUNGSI SOSIALISASI POLITIK DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI JAWA BARAT (Studi Tentang Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat)

Ronald Al Kausar⁷

dan

Dadan Kurnia⁸

Abstrak

Pelaksanaan fungsi sosialisasi politik di lingkungan Provinsi Jawa Barat saat ini menjadikan fokus utama pada peningkatan pendidikan politik masyarakat. Hal tersebut dikarenakan minimnya agen sosialisasi politik, pemberian materi politik, mekanisme politik dan pola sosialisasi politik kepada masyarakat. Partai politik sebagai agen utama dalam menyampaikan sosialisasi politik kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat dapat memberi pengetahuan dan pemahaman politik yang disajikan serta mewujudkan terciptanya partai politik yang baik dan berkualitas. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan partai politik terutama pada fungsi sosialisasi politik masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Barat merupakan organisasi partai politik PDI Perjuangan yang berada di Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan tugas, pokok dan fungsi untuk mengurus partai di daerah seperti

⁶ Dosen Universitas Langlangbuana Bandung

⁷ Alumni IP Unikom

⁸ Dosen Tetap Prodi Ilmu Pemerintahan UNJANI

Dewan Pengurus Cabang (DPC) sampai tingkat ranting sesuai dengan pedoman Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, agen sosialisasi politik tersebut masih minim dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya hubungan kerjasama antara DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat terhadap agen-agen sosialisasi lainnya. Materi sosialisasi politik yang diberikan kepada masyarakat tidak secara penuh tersampaikan. Hal tersebut dikarenakan mobilisasi politik kepada masyarakat terlihat hanya untuk pemenangan partai saja, sedangkan kebijakan, ideologi, visi, misi dan tujuan partai bersifat terbatas hanya kepada anggota internal partai dan simpatisan. Mekanisme sosialisasi politik dilihat dari imitasi, instruksi, dan motivasi saat ini masih minim. Hal tersebut dikarenakan minimnya prestasi dan sejumlah tokoh panutan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan dan perkembangan gagasan ideologi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Pola sosialisasi politik dilihat dari pola repressif dan pola partisipatoris sebagian besar masyarakat tidak memahami konteks politik.

Kata Kunci: Sosialisasi Politik, Partai Politik, Pendidikan Politik

KUALITAS PELAYANAN APARATUR DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PROGRAM UNGGULAN WEBSITE www.disnakjabar.prov.go.id

Tatik Rohmawati⁹ dan Ari Yunadi¹⁰

ABSTRAK

Website www.disnakjabar.prov.go.id merupakan wujud dari pelaksanaan e-Government di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Proses Pelayanan dalam memberikan informasi tentang peternakan kepada masyarakat yang dilakukan melalui *Website www.disnakjabar.prov.go.id* sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat membantu dalam mendapatkan informasi seputar hewan ternak. Permasalahan yang timbul dalam proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui *Website www.disnakjabar.prov.go.id* yaitu masih ada kekurangan dalam memberikan informasi peternakan atau merespon pertanyaan-pertanyaan serta keluhan yang dilakukan masyarakat melalui *Website www.disnakjabar.prov.go.id*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Kualitas Pelayanan Prima yang dikemukakan oleh Lijan Poltak Sinambela, yang terdiri dari empat model yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak. kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive*.

Kata kunci : Kualitas pelayanan, Aparatur, Program Unggulan

⁹ Dosen Tetap Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom

¹⁰ Alumni IP Unikom

